

Authority and Budget for Education Services in the Border Area: Case Study in Sebatik Island, North Kalimantan

Nugroho Trisnu Brata Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstract

One of the Indonesia's land border areas is Sebatik Island, Nunukan Regency, North Borneo Province, which borders on Malaysia. This article aims to examine the gap between the expectation of the improvement of educational services and the reality that the quality of educational services is still lagging behind, in Sebatik Island. The point is highlighted by the question, "Why is there gap between expectation and the reality of educational development in Sebatik?" The research method used in this study is qualitative method. Data is collected through observation, interview, and media study. Result and discussion show that border area is seen as "the backyard" of the Republic of Indonesia. Thus, no wonder if the educational development in the border areas, which is still far from the center of power becomes marginal and left behind. In overcoming the backwardness of the border area of the Republic of Indonesia, a new regional government bureaucracy is formed, which is in the form of a district government and provincial government, namely the establishment of the North Borneo Province. Educational sector is still lack of classroom, teachers, and learning facilities, which become the problems in education in the border area between Indonesia and Malaysia, in Sebatik Island. It can be concluded that regional autonomy should be followed by giving the authority to the regional government in the border area in order to improve educational sector and sufficient fund for educational facilities as well as teacher and educational staff according to the need in the border area.

Keywords

Quality; Education Services; Development; Sebatik; Border Area

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki perbatasan laut, udara, dan darat dengan negara-negara tetangga. Salah satu perbatasan darat terdapat di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara kondisi ideal yaitu harapan meningkatnya kualitas layanan pendidikan, dengan realita masih tertinggalnya kualitas layanan pendidikan di Pulau Sebatik. Poin inilah yang akan dikaji untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan, "mengapa ada kesenjangan antara ide & realita?" Pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Kalimantan Utara seharusnya diikuti oleh kemajuan pembangunan di sektor pendidikan, namun mengapa masih ada daerah yang kekurangan ruang kelas, kekurangan guru, dan kekurangan fasilitas belajar lain?

Wilayah perbatasan NKRI sering dilihat sebagai area yang rawan dengan berbagai gangguan seperti pergeseran patok batas

negara, pencaplokan tanah perbatasan, rawan penyelundupan dan perdagangan gelap. Paradigma lama dalam memandang wilayah perbatasan ini lebih menonjol pada aspek keamanan dan pertahanan. Pada perkembangan selanjutnya juga berkembang paradigma baru yang melengkapi paradigma lama, di mana wilayah perbatasan negara juga dilihat sebagai area yang perlu mendapat perhatian dalam hal pembangunan sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan. Karena wilayah perbatasan sering dilihat sebagai halaman belakang NKRI yang rawan dari aspek keamanan dan pertahanan maka tidak mengherankan jika pembangunan sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan di wilayah perbatasan yang jauh dari pusat kekuasaan menjadi tertinggal. Fenomena ini kontras dengan pusat-pusat kekuasaan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti bandar udara internasional dan pelabuhan laut internasional layaknya sebuah beranda atau halaman depan NKRI terlihat

lebih maju dalam pembangunan sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan.

Kunci pokok pergeseran paradigma mengenai wilayah perbatasan berawal dari adanya kesadaran tentang peranan wilayah perbatasan. Kondisi perbatasan yang awalnya hanya berupa garis dalam sebuah peta atau tanda batas politik (*security check point, passport control and transit point*) kemudian mengalami perkembangan ke arah dimensi yang lebih luas sehingga nuansa *borderless* (tanpa batas) semakin terlihat. Fenomena ini terlihat di negara-negara Uni Eropa. Pergeseran paradigma tersebut mendorong pada berkembangnya aspek *prosperity* (kemakmuran) sehingga fungsi wilayah perbatasan menjadi penting sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi (kawasan strategis) meskipun sering kali terletak di wilayah pinggiran (Muta'ali et al., 2014). Jadi pembangunan perbatasan NKRI harus dilakukan agar daerah perbatasan menjadi pusat-pusat kemakmuran dengan menghapus kondisi terbelakang dan tertinggal seperti yang terjadi di kawasan perbatasan NKRI pada umumnya.

Dalam menyikapi ketimpangan atau ketertinggalan kawasan perbatasan NKRI agar menjadi lebih maju antara lain dengan pembentukan birokrasi pemerintah daerah baru, berupa pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Provinsi Kalimantan Utara secara resmi terbentuk sejak ditandatanganinya UU Nomor 12 tahun 2012 pada 16 November 2012 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Provinsi ini diresmikan pada 22 April 2013 dan harapan baru muncul yaitu terjadinya perubahan kondisi menjadi lebih baik. Pembentukan Kalimantan

Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur sebenarnya adalah modal dasar untuk memajukan pembangunan sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan, dan lain-lain di wilayah perbatasan NKRI yang berbatasan langsung dengan wilayah Negara Malaysia. Wilayah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari empat kabupaten dan satu kota yaitu; Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Kantor Gubernur Kalimantan Utara berada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Sedangkan Pulau Sebatik yang menjadi fokus penelitian ini berada di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negeri/negara bagian Sabah, Malaysia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan studi media. Riset lapangan di Pulau Sebatik dilaksanakan pada bulan April 2018. Dari kedudukan peneliti di Pulau Jawa perjalanan melalui transportasi udara dan laut, yaitu Yogyakarta ke Tarakan dengan pesawat udara kemudian Tarakan ke Pulau Sebatik menggunakan *speedboat*. Kajian ini juga memanfaatkan berita media *mainstream* sebagai sumber data.

Penelitian lapangan ini difokuskan di Desa Aji Kuning dan Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Di Kecamatan Sebatik Tengah terdapat empat desa yaitu; Aji Kuning, Bukit Harapan, Maspul, dan Sungai Limau. Pulau Sebatik dibelah oleh garis batas Negara Indonesia dengan Malaysia yang membujur dari barat ke timur. Batas

Negara ini adalah warisan jaman kolonial Belanda yang menjajah Indonesia dan kolonial Inggris yang menjajah Malaysia. Garis batas ini bersifat abstrak, tidak berujud pagar, bukan sungai, juga bukan gunung, melainkan titik titik koordinat yang ditandai dengan patok-patok batas negara. Di Pulau Sebatik wilayah Indonesia terdapat lima kecamatan yaitu; Sebatik (kecamatan induk), Sebatik Barat, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, dan Sebatik Utara. Semua kecamatan ini berada di dalam wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemekaran daerah di daerah perbatasan menjadi daerah otonomi baru (DOB) dinilai mampu mendorong kemajuan agar tidak terus tertinggal. Syarat pemekaran daerah di perbatasan harus lebih mudah dari pemekaran daerah non perbatasan. "Pemekaran daerah di perbatasan akan memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga lebih optimal melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat", ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Ending. Selama ini, dia melanjutkan, salah satu penyebab daerah di perbatasan tidak bisa berkembang seperti daerah lain karena rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh. Menurut Robert, sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah bisa memekarkan daerah di perbatasan tanpa usulan dari daerah (Kompas, 15 Januari 2015). Salah satu daerah hasil pemekaran adalah Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota.

Walaupun Provinsi Kalimantan Utara sudah berdiri sejak 2013 namun

pembangunan daerah perbatasan belum terlaksana secara signifikan. Pembangunan dalam sektor pendidikan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan masih memperlihatkan ketertinggalan dalam beberapa aspek misalnya aspek ruang kelas, fasilitas belajar lain, dan tenaga guru.

Walaupun pendidikan dasar dan menengah menjadi urusan Kabupaten Nunukan, jika kita melihat fenomena pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah khususnya di Desa Aji Kuning dan Desa Sungai Limau yang berbatasan langsung dengan wilayah Sebatik-Malaysia maka akan tampak fenomena yang menyedihkan. Fasilitas sekolah dasar di perbatasan ini berdiri di atas tiang-tiang kayu, lantai kayu sebagian sudah berlubang dan plafonnya terlepas. Fasilitas air bersih untuk MCK (mandi cuci kakus) juga tidak ada karena mengandalkan turunnya air hujan.



Gambar 1. Bangunan Sekolah Dasar di Desa Aji Kuning (Dokumentasi Pribadi 2018).

Lubang-lubang lantai kelas ini dapat membahayakan siswa maupun guru, yaitu jika tidak berhati-hati dalam melangkahkan kaki maka dapat terperosok dan terluka. Bangunan lantai berbahan kayu memang relatif lebih murah harganya dibandingkan lantai semen. Kondisi seperti ini membuat suasana kelas dalam KBM (kegiatan belajar mengajar) menjadi kurang nyaman karena kecelakaan di dalam kelas setiap saat dapat terjadi kepada siapa saja yang ada di dalam kelas. Lepasnya plafon juga menyebabkan udara di dalam ruang kelas menjadi relatif lebih panas karena atap dari atas meneruskan panas matahari ke dalam kelas. Udara yang terpapar panas oleh atap berbahan asbes juga diindikasikan dapat memicu terjadinya kanker kulit dan penyakit pernapasan sehingga membahayakan kesehatan para siswa dan guru. Di beberapa Negara Eropa asbes dilarang digunakan sebagai atap karena dampak negatif terhadap kesehatan manusia.



Gambar 2. Ruang kelas dengan plafon yang sudah lepas dan bak penampung air hujan untuk MCK (Dokumentasi Pribadi, 2018).

Kurangnya atau tidak tercukupinya air bersih pada MCK di sekolah juga menyebabkan polusi udara khususnya bau kotoran setelah buang air kecil (BAK) dan buang air besar (BAB). Selain polusi udara tentu saja penyebaran penyakit menular akan mudah

berkembang dengan kondisi MCK seperti ini. Kebutuhan tenaga guru juga perlu mendapat perhatian oleh pemerintah karena menjadi guru di daerah terpencil seperti di perbatasan itu tidak semua orang sanggup menjalani. Jaminan kesejahteraan hidup para guru dan keluarganya harus diwujudkan agar para guru betah bekerja di sekolah-sekolah perbatasan.

Lain halnya kondisi pendidikan sekolah dasar di Desa Sungai Limau. Di desa ini dulu banyak anak yang tidak terurus ketika kedua orang tuanya bekerja, umumnya bekerja di kebun sawit dan kebun coklat. Anak-anak ini tidak mendapat pendidikan semestinya di usia wajib belajar seperti pada anak-anak di daerah lain di Indonesia. Menyikapi kondisi anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian orang tua dan hak anak terhadap pendidikan kemudian di desa ini berdiri sebuah sekolah swasta yang dipelopori oleh seorang bidan bernama Hj. Suraidah. Sekolah di tapal batas ini bisa disebut sebagai ironi pendidikan, sebab bangunan sekolah ini dibangun secara sederhana ada yang terbuat dari kayu--dan ada juga yang terbuat dari tembok semen karena bantuan BUMN dan lembaga filantropi domestik. Kompleks bangunan sederhana ini selain menampung anak-anak warga sekitar sekolah juga menampung anak-anak TKI yang ikut orang tua mereka bekerja di wilayah Malaysia.

Sekolah tapal batas ini nama resminya adalah Madrasah Ibtidaiyah Darul Furqon, diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Ar-Rasyid yang alamatnya ada di Kota Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Jadi sekolah di tapal batas ini (MI Darul Furqon) berada di bawah wewenang Kementerian Agama, bukan di bawah wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Gambar 3. Bangunan Madrasah Ibtidaiyah Darul Furqon (Sekolah Tapal Batas) di Desa Sungai Limau (Dokumentasi Pribadi, 2018).

Sekolah tapal batas ini menampung puluhan anak-anak usia sekolah yang umumnya dari Kampung Bernyoko dan Bergosong di wilayah Sebatik Malaysia. Mereka ikut orang tuanya yang bekerja di kebun sawit atau kebun coklat di Malaysia dan bermukim di Kampung Bergosong dan Bernyoko. Mereka tidak mendapat hak atas pendidikan di Malaysia karena mereka bukan warga Negara Malaysia. Dari Bergosong anak-anak ini berjalan kaki menyusuri jalan tanah sekitar 3 jam kemudian menyeberang perbatasan Indonesia-Malaysia secara ilegal. Setelah melewati perbatasan baru kemudian mereka sampai di Sekolah Tapal Batas yang ada di Desa Sungai Limau.

Kekurangan ruang kelas, kekurangan guru, dan kekurangan fasilitas belajar lain menjadi persoalan dunia pendidikan di perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Padahal, layanan pendidikan itu juga melayani anak-anak tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Puluhan anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Tawau, Malaysia, setiap hari melintasi daerah perbatasan untuk belajar di jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK di Pulau Sebatik. Anak-anak TKI itu tidak bisa mengakses pendidikan di Malaysia. Dionisius Orwan, Kepala SDN No 005 Sebatik Tengah, saat menerima kunjungan guru-guru SMA/SMK/MA se-Indonesia dalam kegiatan

Kemah Wilayah Perbatasan (Kawasan), Selasa (27/8), mengatakan, ada sedikitnya 35 anak TKI menyeberangi daerah perbatasan menuju Desa Sungai Limau untuk bersekolah. Anak-anak ini memulai perjalanan dari daerah perkebunan sawit di Bergosong Kecil, Sabah, melewati jalan yang rusak dan turun naik selama 1-2 jam. Ada anak-anak TKI yang bersekolah di SDN No 005 ditampung di asrama sebuah yayasan di Desa Sungai Limau. Tujuannya agar anak-anak tersebut tidak menempuh jarak jauh ke sekolah. Namun, kapasitasnya terbatas. Meskipun layanan pendidikan terbatas, semangat anak-anak untuk belajar cukup tinggi. Sebanyak 173 siswa SD itu masuk bergantian karena hanya tersedia tiga ruang kelas. Siswa kelas I, II, IV, dan VI masuk pada pagi hari, sedangkan siswa kelas III dan V masuk sore hari.

Rudiatin (2012) dalam kajiannya tentang perbatasan di Pulau Sebatik, Nunukan mengatakan bahwa daerah perbatasan saat ini menjadi isu penting bagi NKRI setelah beberapa kali mengalami sengketa perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dan sengketa blok Ambalat dengan Malaysia, mendorong pemerintah RI untuk membangun daerah perbatasan menjadi "beranda" negara. Perbatasan sering dilihat sebagai zona ketidakstabilan, ketidakpastian, terpinggirkan, dan penuh bahaya serta kriminalitas. Wilson (2011) dalam bukunya berpendapat bahwa studi perbatasan menarik perhatian antropolog sebagai lensa yang unik yang akan digunakan untuk melihat persimpangan dari kekuatan nasional, transkultural dan transnasional yang membentuk keamanan dan ketidakamanan di era globalisasi. Dalam kasus lain, migrasi lintas

batas negara terjadi karena didorong oleh keinginan untuk berlindung dari kewajiban pajak, menghindari penindasan politik dan ekonomi, atau memanfaatkan peluang ekonomi. Selalu ada ketidaksetaraan *borders*, sehingga *borderlanders* memiliki sikap tanpa beban dan mencari berbagai akal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan memanfaatkan kondisi perbatasan yang cair. *Borderlanders* sering berpolitik ambivalen, perilaku ambivalen dalam kegiatan perekonomian dapat ditemukan pada pelaku pasar di Aji Kuning, Sebatik. Harapan dan impian masyarakat Aji Kuning, Sebatik terhadap perbatasan untuk memiliki kehidupan lebih baik ditemukan di negeri seberang, Malaysia. Segala kebutuhan barang dan jasa ditawarkan dalam berbagai kemudahan di negeri seberang. Akses ke negeri seberang bagi masyarakat Sebatik lebih mudah dibandingkan ke ibukota kecamatan dan kabupaten di wilayah Kalimantan.

Rudiatin melihat bahwa masyarakat di Desa Aji Kuning, Pulau Sebatik membangun jaringan-jaringan perdagangan yang berkait kelindan dengan aspek sosial, politik, budaya, kekerabatan, dan etnik. Mereka mengaktifkan simpul kekerabatan dan etnisitas untuk membangun jaringan. Identitas etnik bersifat kontekstual bergantung pada kepentingan dan motif ekonomi. Jaringan perdagangan meliputi berbagai unsur, mulai dari pembeli, penjual, pemodal, dan broker dengan keragaman etnik dan kebangsaan serta pembagian kerja. Jaringan memiliki beragam fungsi; sebagai jaringan komunikasi dan informasi harga dan permodalan serta berbagai keuntungan dan risiko dengan variasi pertemanan, kekerabatan, dan patron-klien yang bersinggungan dengan berbagai institusi, pemerintah, kelompok etnik,

dan aparat perbatasan Indonesia-Malaysia. Semuanya terintegrasi ke dalam suatu kegiatan ekonomi lokal di perbatasan. Rudiatin memusatkan kajiannya pada fenomena ekonomi. Perbedaan tulisan Rudiatin di muka dengan penelitian yang kami lakukan terletak pada fokus kajian, karena kami memfokuskan kajian pada topik yang lebih sempit dan spesifik yaitu dampak pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Kalimantan Utara terhadap layanan pendidikan di Pulau Sebatik.

Winarjo (2011) menyebutkan bahwa di perbatasan Provinsi Papua dengan Papua New Guinea serta di perbatasan Provinsi NTT dengan Timor Leste, jika diobservasi sambil lalu sepertinya tidak ada masalah serius. Namun jika dilakukan pencarian data secara *depth-interview* serta perenungan secara *verstehen*, ternyata terungkap bahwa kebanggaan mereka sebagai bagian dari NKRI tidak tinggi. Mereka mengaku iri terhadap perlakuan pemerintah kepada masyarakat lain khususnya di perkotaan dan di Pulau Jawa. Permasalahan menjadi lebih serius jika kita meneliti masyarakat yang tinggal di perbatasan dengan Malaysia, menurut mereka pemerintah Malaysia lebih perhatian kepada rakyatnya dari pada pemerintah Indonesia kepada rakyatnya. Pemerintah Indonesia dianggap berlaku tidak adil terhadap rakyat di kawasan perbatasan. Pendekatan untuk memahami keadilan dapat dilakukan melalui berbagai dimensi. Plato misalnya, membangun konsep keadilan dengan mengedepankan pendekatan hukum dari pada pendekatan politik (Russell, 2007). Menurut Plato keadilan akan terwujud jika setiap orang dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan tetap menghormati hak-hak orang lain sehingga tidak terjadi kekacauan. Di kawasan perbatasan jika Negara

Indonesia memiliki komitmen mewujudkan keadilan dan *welfare state*, seharusnya aspek-aspek; pendidikan, kemiskinan, kesehatan, anak-anak dan wanita, serta lapangan pekerjaan dijadikan prioritas pembangunan.

Dalam pikiran Winarjo jika dilakukan penelitian secara mendalam terhadap dinamika kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan akan ditemukan berbagai data yang secara umum tidak tampak di permukaan dalam kehidupan masyarakat. Sebenarnya di dalam pikiran masyarakat tersembunyi rasa adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat warga perbatasan yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan. Jadi Winarjo menggunakan perspektif ketidakadilan dalam mengkaji masyarakat di kawasan perbatasan. Perbedaan tulisan di muka dengan penelitian yang kami lakukan terletak pada perspektif, jika Winarjo memakai perspektif ketidakadilan maka kami menggunakan perspektif dampak pembentukan daerah otonomi baru (DOB), yaitu dampak pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang dikaitkan dengan layanan pendidikan terhadap masyarakat lokal. Jika Winarjo mengkaji perbatasan di NTT-Timor Timur, di Papua-Papua Nugini, dan di Kalimantan Utara-Sabah maka kami lebih mengerucut pada kajian layanan pendidikan di Pulau Sebatik yang berada di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Pembangunan pada sektor pendidikan menjadi tugas atau kewajiban Negara Indonesia untuk mencerdaskan rakyatnya. Seringkali ditemukan fenomena bahwa pembangunan pendidikan di Indonesia sudah maju pesat dan modern dengan berbagai fasilitas pendidikan yang disediakan oleh negara atau pemerintah, kurikulum yang modern, dan berbagai prestasi dan peringkat

tinggi yang dicapai oleh institusi-institusi pendidikan maupun oleh peserta didik serta para alumni. Akan tetapi fenomena positif tersebut sering kali hanya berpusat di daerah-daerah perkotaan terutama di perkotaan Pulau Jawa. Potret berbeda dalam waktu yang sama juga dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia di luar Pulau Jawa, antara lain di berbagai kawasan perbatasan NKRI dengan negara tetangga. Ketiadaan atau minimnya layanan pendidikan, minimnya SDM bidang pendidikan, dan fasilitas lain dalam pendidikan menjadi mimpi buruk sebagian rakyat Indonesia terutama di kawasan perbatasan. Pendidikan menjadi aspek utama dalam kegiatan pembangunan karena pendidikan dapat dilihat sebagai salah satu bentuk investasi sosial bagi rakyat Indonesia.

Sutadji (2004) mengatakan bahwa sistem sekolah akan selalu dikaitkan dengan data jumlah lulusan sekolah dan lapangan kerja yang tersedia. Dari perbandingan itu didapat jumlah pencari kerja dan angka pengangguran dalam suatu wilayah secara faktual. Pemikiran ini dibangun berdasar konsepsi Schultz (1960), orang yang pertama secara sistematis menganalisis investasi di bidang pendidikan pada produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Schultz pernah menyampaikan pidato berjudul *Investment in Human Capital*, bahwa melalui pendidikan dihadapkan terbentuk masyarakat yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Jadi pendidikan bukan semata-mata kegiatan konsumtif, melainkan juga kegiatan investasi yaitu investasi dalam sumber daya manusia/SDM. Selanjutnya Lewis menganalisis masyarakat dengan jumlah penduduk (tenaga kerja) yang tidak terbatas sekaligus juga permasalahan pendidikan mereka. Hal itu

merupakan suatu kerangka pemikiran mengenai konsep-konsep pembangunan ekonomi yang menjadi dasar kegiatan pembangunan bidang pendidikan. Dalam memperbaiki kemakmuran rakyat yang masih miskin, yang menentukan bukan uang atau lahan pertanian, yang menentukan adalah perbaikan kualitas penduduk dan memajukan ilmu pengetahuan/pendidikan. Jadi dalam peningkatan ekonomi suatu bangsa yang cukup menentukan adalah nilai investasi sumber daya manusia. Lebih lanjut Sutadji mengatakan bahwa penelitian pendidikan juga menemukan fenomena tentang lemahnya manajemen sekolah dan rendahnya kontribusi masyarakat lokal terhadap pendidikan (Salim, 2001; Salim, 2002).

Dengan memperhatikan paparan data primer hasil penelitian lapangan dan data sekunder di muka yang dikaitkan dengan pendapat beberapa ahli maka terlihat bahwa fenomena pendidikan di daerah perbatasan masih tertinggal dari daerah-daerah lain terutama daerah perkotaan atau daerah dekat pusat pemerintahan. Niat baik pemerintah dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru (DOB) perlu disambut dengan sikap optimis bahwa dengan cara itu maka tertinggalnya kualitas pendidikan di daerah perbatasan negara akan bisa diperbaiki dengan lebih efektif. Namun kendala juga muncul di mana pembangunan sarana dan prasarana yang terkait dengan pendidikan sangat tergantung pada anggaran dan belanja pemerintah. Pendapatan asli daerah yang tidak terlalu besar dan panjangnya rantai birokrasi dalam penentuan dan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pendidikan masih belum mendukung percepatan pembangunan layanan pendidikan daerah

perbatasan. Begitu juga keberadaan guru profesional juga masih kurang, hal ini terjadi karena banyak faktor antara lain akses komunikasi dan transportasi yang sulit, jauh dari pusat perekonomian, jauh dari pusat pemerintahan, fasilitas tempat tinggal, dan sarana prasarana umum yang masih minim. Hal itu menyebabkan guru-guru profesional dari luar daerah tidak mau bertugas di sekolah-sekolah perbatasan. Sedangkan warga setempat belum banyak yang memiliki kualifikasi sebagai guru profesional untuk mengajar di sekitar tempat tinggal mereka.

SIMPULAN

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa daerah perbatasan biasa dilihat seperti "halaman belakang" NKRI, maka tidak mengherankan jika pembangunan sektor pendidikan di wilayah perbatasan yang jauh dari pusat kekuasaan menjadi marginal dan tertinggal. Di sektor pendidikan ternyata kekurangan ruang kelas, kekurangan guru dan kekurangan fasilitas belajar lain menjadi persoalan dunia pendidikan di perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Padahal, layanan pendidikan itu juga melayani anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ada di Malaysia. Puluhan anak tenaga kerja Indonesia di wilayah Malaysia, setiap hari melintasi daerah perbatasan untuk belajar di Pulau Sebatik Indonesia. Anak-anak TKI itu tidak bisa mengakses pendidikan di Malaysia karena bukan warga Negara Malaysia.

Paradigma lama dalam memaknai perbatasan negara sebagai "halaman belakang" yang identik dengan masyarakat marginal, terbelakang, penyelundupan, atau perdagangan ilegal, yang berbeda dengan

“halaman depan sebuah rumah” yang tertata rapi, indah, serta memesona tamu. Namun kemudian terjadi pergeseran paradigma tentang perbatasan, bahwa perbatasan seharusnya adalah halaman depan sebuah negara dalam berhubungan dengan negara tetangga. Seperti fenomena yang terjadi di perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Pembangunan daerah perbatasan ini tidak optimal karena tidak adanya wewenang penuh dan dukungan dana yang memadai bagi pembangunan layanan pendidikan.

Dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah harus diikuti oleh pemberian wewenang sepenuhnya kepada pemerintah daerah kabupaten di daerah perbatasan dalam memajukan sektor pendidikan dan pemberian anggaran yang memadai untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak beserta guru dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah perbatasan.

Sebagai rekomendasi maka perlu dikaji lebih mendalam keberadaan sekolah alternatif yang dapat menampung anak-anak TKI di seberang batas negara, yang berada di dalam perkebunan-perkebunan kelapa sawit Malaysia. Anak-anak itu tidak memperoleh hak pendidikan di wilayah Malaysia karena mereka bukan warga Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R. & Steven J. T. (1992). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologi terhadap Ilmu-ilmu Sosial. Surabaya: Usaha Nasional.
- Brata, N. T. (2018). Kualitas Layanan Pendidikan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Sejak Berdirinya Provinsi Kalimantan Utara, *The 2nd International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH 2018)*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 23-25 Oktober 2018.
- Deviana, A. (2013). Pendidikan di Perbatasan Minim Fasilitas. Kompasiana. Available at: <http://rumahkemuning.com/2013/09/pendidikan-di-perbatasan-minim-fasilitas/>.
- Juliet, C., & Strauss, A. (2003). Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Kompas Newspaper. (15/012015). Pemekaran Pacu Pertumbuhan di Perbatasan.
- Muta'ali, L., Marwast, D., & Christanto, J. (2018). *Pengelolaan wilayah perbatasan NKRI*. UGM PRESS.
- Rudiatin, E. (2012). Integrasi Ekonomi Lokal di Perbatasan (Suatu Kajian Ekonomi Masyarakat Desa Aji Kuning Pulau Sebatik-Nunukan Kalimantan Timur, Perbatasan Indonesia-Sabah Malaysia)= Local Economic Integration (Study in Aji KuningVillage Sebatik Island East Kalimantan Province the Borderline of Indonesia and Sabah Malaysia.
- Spradley, J. P., Elizabeth, M. Z., & Amirudin. (1997). *Metode etnografi*. Tiara Wacana Yogya.
- Sutadji, I. (2004). Pendidikan dalam Penguatan Basis Ekonomi dalam Agus Salim (Ed). Indonesia Belajarlah, Membangun Pendidikan Indonesia. Semarang: Gerbang Madani.
- Winarjo, W. (2011). Rendahnya Akses Keadilan bagi Rakyat di Perbatasan. *Jurnal Transisi*, 7, 49-62.